



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 250/HUMAS PMK/X/2022

Penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem dan Revitalisasi Pendidikan Vokasi Jadi Fokus Pemerintah

KEMENKO PMK -- Pemerintah saat ini dihadapi oleh berbagai persoalan yang harus ditangani secara cepat dan tepat khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi saat ini yaitu terkait penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pendidikan vokasi di Indonesia.

"Terdapat tiga persoalan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini yaitu berkaitan dengan penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan merevitalisasi pendidikan vokasi," Jelasnya saat memberikan sambutan pada Milad Muhammadiyah Ke-113 di SD Muhammadiyah 1 Desa Paiton, Kabupaten Probolinggo, Minggu (09/10/2022).

Berkaitan dengan permasalahan stunting, Menko Muhadjir berharap baik itu pemerintah pusat dan daerah dapat mengalokasikan anggarannya untuk penanganan stunting termasuk anggaran dana desa.

Karena menurutnya, yang tahu persis berapa jumlah ibu hamil dan berapa jumlah bayi dibawah umur dua tahun adalah Kepala Desa nya itu sendiri.

"Karena itu saya minta kepala desa baik pak kades maupun bu kades harus tahu persis berapa jumlah warganya yang hamil dan berapa jumlah warga yang memiliki anak bayi di bawah dua tahun, dan itu harus betul-betul diberikan asupan gizi yang memadai sesuai petunjuk yang sudah dibuat oleh kementerian kesehatan maupun oleh pemerintah daerah setempat," Sebutnya.

Selanjutnya berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem pemerintah mulai melakukan pendataan terhadap keluarga-keluarga yang masuk kedalam miskin ekstrem sehingga nantinya program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran.

Untuk mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024, pemerintah telah menyediakan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Dengan data by name by address, dan data per desa, maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran dan tidak ada lagi anggaran dana desa yang meleset serta diluar sasaran," Ucapnya.

Kemudian persoalan yang tidak kalah pentingnya yaitu revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. Menurut Mantan Mendikbud, pendidikan vokasi perlu diperbanyak karena dapat menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja.

"Revitalisasi pendidikan vokasi ini sejalan dengan bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia. Karena itu, kita tidak ada pilihan lain lagi selain kita memanfaatkan bonus demografi ini dengan sebaik mungkin demi mewujudkan Indonesia emas 2045," Tuturnya.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi, Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsyah Khadafi, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo David P Duarsa, Wakil Ketua Umum PWM Jawa Timur Nurcholis Huda beserta jajarannya.

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**